



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

**Esi Intan Sari
NIM 150810101053**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

**Esi Intan Sari
NIM 150810101053**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Anik Ambarwati dan Ayahanda Sussaeri tercinta atas segala dukungan baik dalam doa kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Saudaraku Agil Sihasale dan Wanda Ayu Tria Saputri yang telah menjadi salah satu penyemangan bagi penulis.
3. Guru-guru sekolah dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercinta yang selalu memberi sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai”

(Schopenhauer)

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”

(Evelyn Underhill)

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri”

(Muhammad Ali)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Esi Intan Sari

Nim : 150810101053

Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar.

Demikian pernyataan yang saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jember, 02 September 2019

Yang Menyatakan,

Esi Intan Sari
NIM 150810101053

SKRIPSI

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

Esi Intan Sari
150810101053

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Moehammad Fathorazzi, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Nama : Esi Intan Sari

Nim : 150810101053

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 02 September 2019

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP. 196306141990021001

Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si.
NIP. 198301162008122001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.
NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Esi Intan Sari

Nim : 150810101053

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitian penguji pada tanggal 31 Oktober 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Siti Komariah, M.Si. (.....)

NIP. 197106102001122002

2. Sekertaris : Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E. (.....)

NIP. 198103302005011003

3. Anggota : Dr. Moh. Adenan, M.M. (.....)

NIP. 196610311992031001

Mengetahui/menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan

Dr. Muhammad Miqdad S.E., MM., Ak.,CA.
NIP 19710727 199512 1001

*PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENGENTASKAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER*

Esi Intan Sari

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pembangunan desa saat ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah terutama terkait dengan pemberdayaan ekonomi dan kemiskinan masyarakat. Pemerintah menerapkan pendekatan baru untuk menstimulus perekonomian pedesaan yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran BUMDes dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Panti, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, BUMDes dan pendapatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Wilcoxon dan dikaitkan dengan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BUMDes berperan dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Panti selain itu pendapatan juga memiliki pengaruh dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Panti.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, Kemiskinan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan.

*THE ROLE OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES(BUMDES) IN REDUCING
POVERTY AT PANTI DISTRICT JEMBER REGENCY*

Esi Intan Sari

*Faculty of Economics and Business, Programme of Study in Economic
Development, Jember University*

ABSTRACT

Village development is currently receiving more attention from the government, especially related to economic empowerment and community poverty. The government adopted a new approach to stimulate the rural economy through the Village Owned Enterprises. This research belongs to quantitative-descriptive. It aims at knowing the role of BUMDes in reducing poverty at Panti district. The variables in this research consist of poverty, BUMDes and community income. The methodology in this research uses Wilcoxon which is combined with descriptive analysis. Based on the result of the research, it shows that BUMDes variable has significant role in reducing poverty which happened at Panti village as well as community income.

Keywords: Community development, Poverty, Village Owned Enterprises (BUMDes). Community Income.

RINGKASAN

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Panti Kabupaten Jember; Esi Intan Sari; 150810101053; Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dialami oleh banyak negara tidak hanya negara berkembang namun juga negara maju. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, kemiskinan juga dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan ekonomi suatu negara. Kemajuan ekonomi nasional akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik ditingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten akan tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Eksistensi desa mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus perekonomian di pedesaan adalah memalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa (Derwita dan Nyoman, 2018).

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan uji Wilcoxon. Tempat dan waktu penelitian dilakanakan di 4 desa yang ada di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Adapun sumber data yang diambil yaitu dari

hasil kuesioner, wawancara, profil desa, BPS, buku literature, jurnal, penelitian terdahulu, BPS dan searching internet.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes dalam mengentaskan kemiskinan yang dilihat dari perbandingan pendapatan masyarakat dan mata pencaharian masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes di Kecamatan Panti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara yang dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Panti pada tahun 2019 dengan menggunakan alat analisis SPSS.

Hasil penelitian dengan pengolahan SPSS *Paired Sample T-Test* menunjukkan bahwa nilai asymp. Sig (2tailed) dari pendapatan masyarakat lebih kecil dari 0.005 yaitu nilainya sebesar 0.000, maka H_0 diterima yang berarti terdapat peran BUMDes dalam mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil Uji Wilcoxon data matapencaharian masyarakat juga diperoleh nilaiSig. (2-tailed) 0.000 kurang dari 0.05 maka H_0 diterim. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut dapat disimpulkna bahwa dengan adanya BUMDes berperan dalam mengentaskaan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat yang maka secara tidak langsung membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.

PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Panti Kabupaten Jember*” Skripsi ini disusunguna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M., Ak., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Riniati, M.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Herman Cahyo Diarto, S.E., M.P. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Moehammad Fathorazzi, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, nasihat dan pengarahan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan penuh perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Fivien Muslihatinningsih, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, nasihat dan pengarahan dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan penuh perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;

7. Teman-teman Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2015 terimakasih terima kasih banyak motivasi dan semangatnya;
8. Semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 18 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

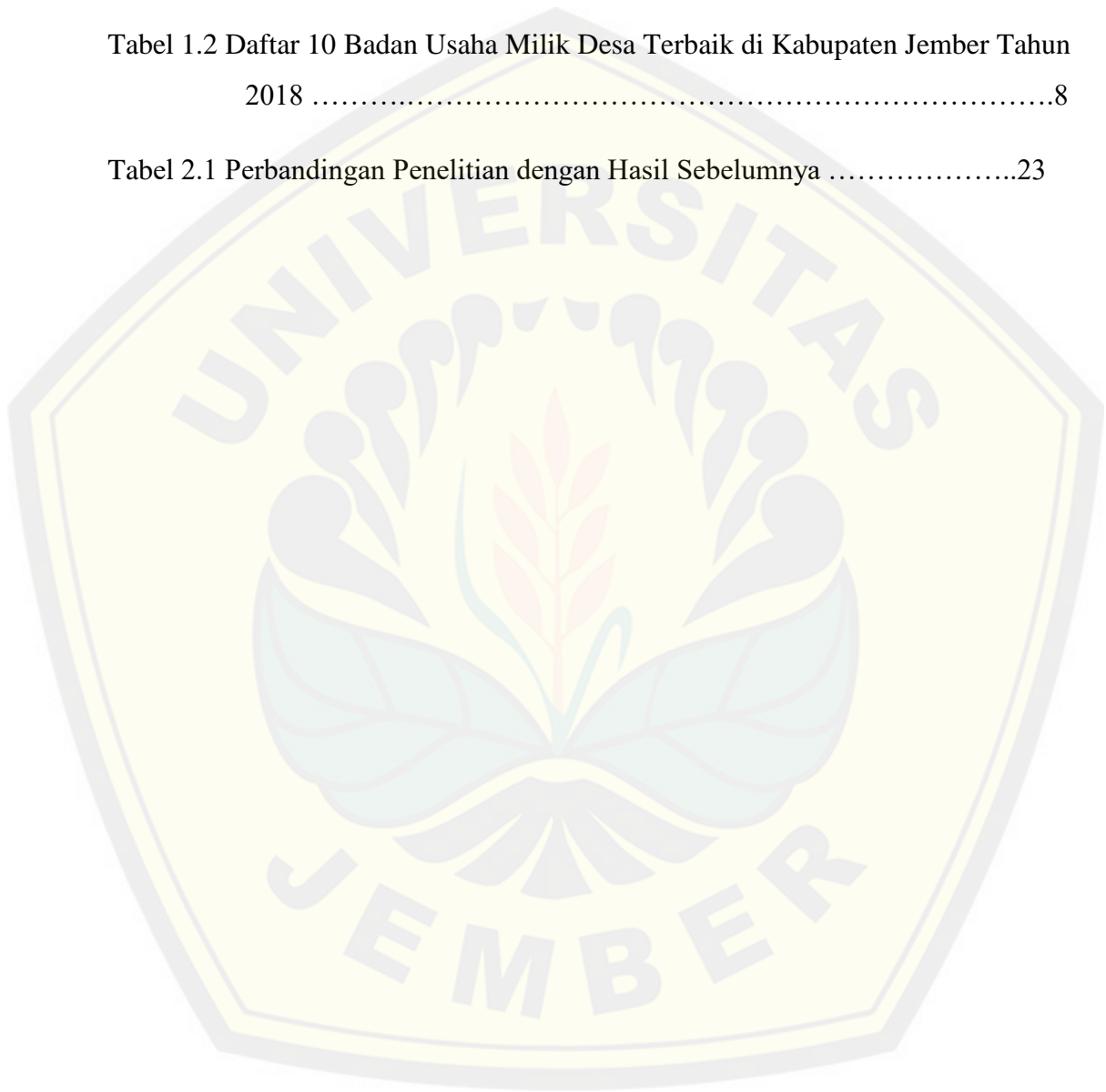
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERNYATAAN.....	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRAK</i>	x
RINGKASAN.....	xi
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	
xix	
DAFTAR GAMBAR.....	
xx	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
xxi	
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	
9	
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Kemiskinan	10

2.1.2 Badan Usaha Milik Desa	14
2.1.3 Peran Pemerintah	15
2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat	16
2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Konseptual	25
2.6 Hipotesis Penelitian	28
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Rancangan Penelitian	29
3.1.1 Jenis Penelitian	29
3.1.2 Unit Analisis	29
3.1.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Populasi dan Sampel	30
3.4 Metode Pengumpulan Data	31
3.5 Metode Analisis Data	33
3.6 Definisi Operasional Variabel	33
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	35
<u>5.1</u>	G
 ambaran Umum	35
<u>5.1.2</u>	B
adan Usaha Milik Desa	35
4.1.2 Kecamatan Panti	38
4.1.3 Desa Suci	39
4.1.4 Desa Serut	40
4.1.5 Desa Kemiri	40
4.1.6 Desa Glagahwero	41

4.2 Hasil Uji Paired Sample T-Test	
41	
4.2.1 Hasil Uji Normalitas <i>Saphiro Wilk</i>	42
4.2.2 Hasil Uji Paired Sample T-Test	42
4.3 Pembahasan	43
4.3.1 Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah BUMDes	44
4.3.2 Peran BUMDes dalam Mengentaskan Kemiskinan	46
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Kesimpulan	
50	
5.1 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55

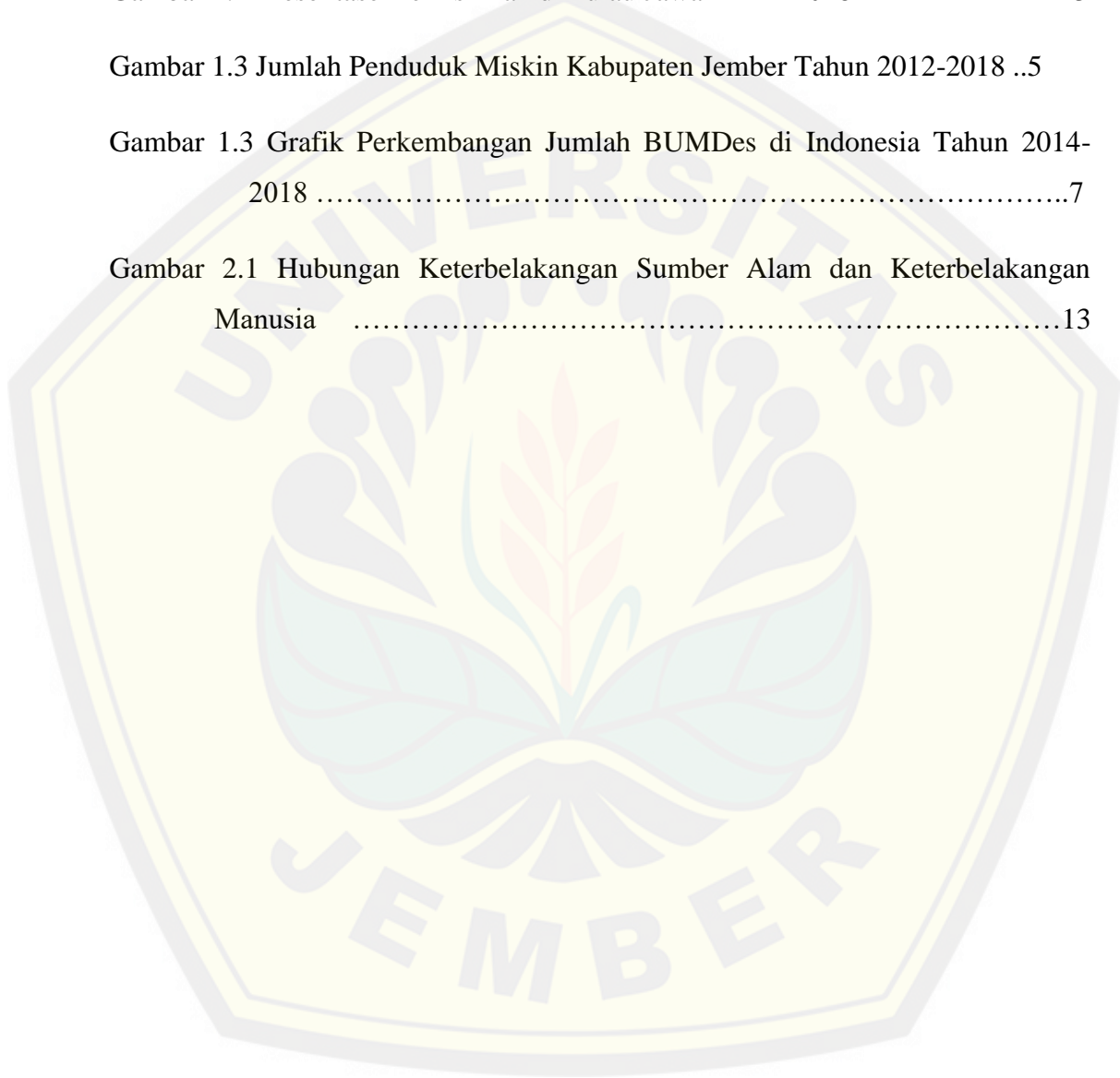
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 10 Kabupaten Kota dengan Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2012-2017	4
Tabel 1.2 Daftar 10 Badan Usaha Milik Desa Terbaik di Kabupaten Jember Tahun 2018	8
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian dengan Hasil Sebelumnya	23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lingkaran Setan Kemiskinan	2
Gambar 1.2 Presentase Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2018	3
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jember Tahun 2012-2018 ..	5
Gambar 1.3 Grafik Perkembangan Jumlah BUMDes di Indonesia Tahun 2014-2018	7
Gambar 2.1 Hubungan Keterbelakangan Sumber Alam dan Keterbelakangan Manusia	13



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.	Banyaknya Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2017	57
Lampiran B.	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2012-2017	59
Lampiran C.	Data Hasil Kuesioner Responden Berdasarkan Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah BUMDes	61
Lampiran D.	Data Hasil Kuesioner Responden Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat Sebelum dan Sesudah BUMDes	62
Lampiran E.	Hasil Uji Normalitas <i>Saphiro Wilk</i> Pendapatan Masyarakat	63
Lampiran F.	Hasil Uji <i>Paired Sample T-Test</i>	67
Lampiran G.	Surat Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas ..	68
Lampiran H.	Surat Permohonan Ijin penelitian dari Bakesbangpol	69
Lampiran I.	Kesioner Penelitian	70
Lampiran J.	Dokumentasi Penelitian	79

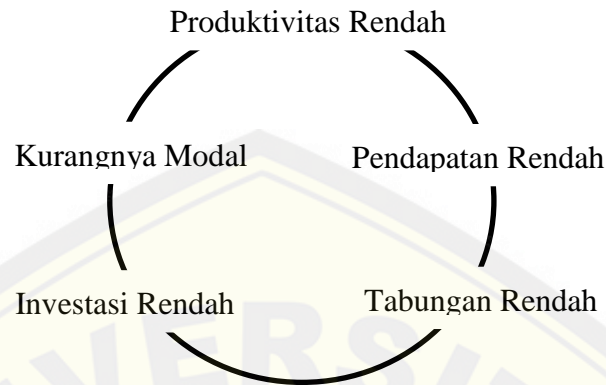
BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang dialami oleh banyak negara, bukan hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang namun juga negara yang perekonomiannya sudah mapan. Masalah kemiskinan menjadi isu yang diperhatikan, bahkan masalah kemiskinan mendapat perhatian dari gerakan global yang tercermin melalui konferensi tingkat dunia yang berhasil menggelar Deklarasi dan Program Aksi untuk Pembangunan Sosial (*World Summit in Social Development*) di Copenhagen pada tahun 1995 (Eko, 2006). Menurut Baldwin dan Meier terdapat enam aspek kemiskinan yaitu; sebagai produsen barang-barang primer, adanya masalah tekanan penduduk seperti pengangguran di desa dan kenaikan jumlah penduduk yang pesat, sumber daya alam yang tersedia belum mampu diolah dengan maksimal, keadaan penduduk yang masih terbelakang, kekurangan kapital serta orientasi perdagangan ke luar negeri kecil. Melihat hal tersebut menimbulkan kesadaran bangsa-bangsa di negara maju bahwa “kemiskinan di suatu tempat merupakan bahaya bagi kemakmuran” yang menunjuk pada rendahnya tingkat pendapatan per kapita dan kurangnya modal.

Penyebab kemiskinan berpusat pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang ditemukan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam Jhingan, yang mengatakan “*a poor country is poor because it is poor*” (Negara miskin itu karena dia miskin). Lingkaran setan kemiskinan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang berinteraksi satu sama lain yang menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Lingkaran setan kemiskinan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total dinegara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna dan keterbelakangan perekonomian. Kekurangan modal dalam perekonomian menyebabkan rendahnya produktifitas, yang kemudian mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Untuk mengurangi kemiskinan maka harus memotong lingkaran dan perangkat kesmiskinan (Kuncoro, 2004).

Berikut adalah gambar lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

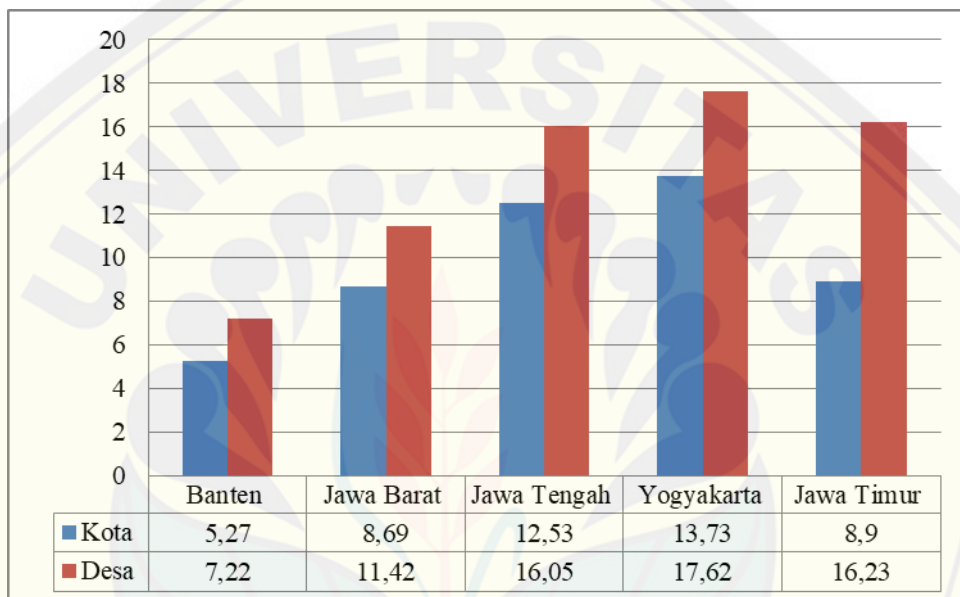


Gambar 1.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (Sumber: Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan M.L Jhingan)

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan yang rendah menyebabkan tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan investasi rendah dan modal kurang. Kekurangan modal pada gilirannya berpusat pada produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas ini dikarenakan kebanyakan masyarakat buta huruf dan tidak terdidik, alat dan metode yang digunakan produksi untuk produksi sudah usang atau tertinggal. Lapangan usaha yang ada dipedesaan pada umumnya hanya bidang pertanian pangan yang tidak banyak tersentuh sektor pasar perekonomian (Jhingan,2010). Daerah pedesaan rentan terhadap masalah kemiskinan dan perlu adanya pembangunan untuk menciptakan kemandirian termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan kenaevaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung rantai produksi dan pemasaran serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional (Tama dan Yanuardi, 2013).

Negara yang sampai saat ini masih mengalami masalah kemiskinan salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar, pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia mencapai

266.927.712 jiwa, dan jumlah penduduk miskin sebesar 26,95 juta jiwa atau 9,82% dari total penduduk Indonesia. Di Pulau Jawa, provinsi yang memiliki angka kemiskinan diatas angka nasional terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta di peringkat 12 dengan angka kemiskinan sebesar 11,7%, Jawa Tengah di peringkat 12 dengan angka kemiskinan sebesar 11,7%, Jawa Tengah di peringkat ke-15 dengan angka kemiskinan 10,8% sedangkan Jawa Timur berada di peringkat ke-16 dengan angka kemiskinan 10,37% (Badan Pusat Statistika, 2019).



Gambar 1.2 Presentase Kemiskinan di Paulau Jawa Tahun 2018 (Sumber: Badan Pusat Statistika Tahun 2018, diolah)

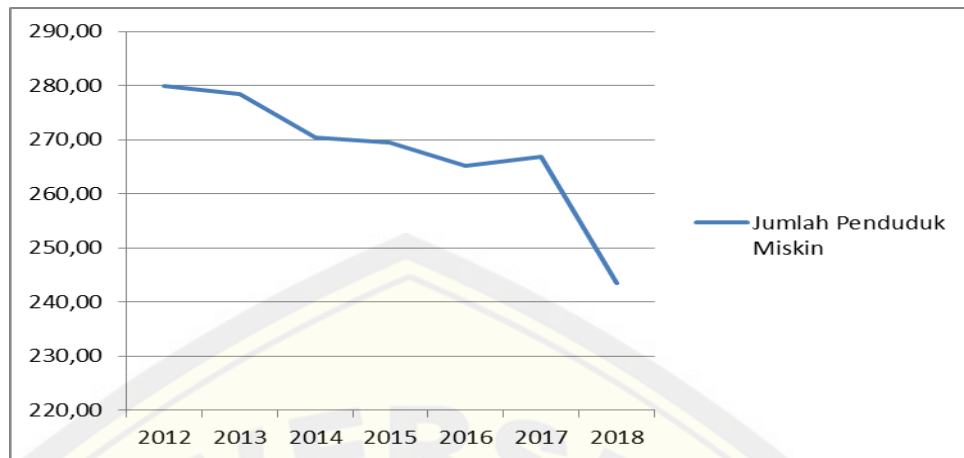
Berdasarkan presentase kemiskinan di Pulau Jawa dapat dilihat tingkat perbandingan kemiskinan antara desa dan kota, dimana presentase kemiskinan lebih besar di daerah desa. Kemiskinan yang terjadi di desa disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya putus sekolah, angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka pernikahan dini serta kurangnya lapangan kerja yang ada didesa. Selain itu kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Jember juga dikarenakan jumlah anggota keluarga yang banyak, kuota program JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang sedikit serta umur kepala keluarga (Purnomo, 2013). Selain itu juga dikarenakan tingkat produksi yang rendah yang kemudian mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

Tabel 1.1 10 Kabupaten Kota dengan Rat-rata Jumlah Kemiskinan Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2012-2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)
1	Kab. Malang	224,12
2	Kab. Jember	208,77
3	Kab. Probolinggo	185,14
4	Kab. Sampang	179,36
5	Kab. Sumenep	174,52
6	Kab. Bangkalan	164,51
7	Kab. Kediri	152,91
8	Kab. Tuban	153,92
9	Kab. Bojonegoro	144,13
10	Kab. Lamongan	140,81

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur (Susenas Maret) Tahun 2018, diolah

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, angka kemiskinan mencapai 4.332,59 ribu jiwa, jumlah ini sudah berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 4.405,27 ribu jiwa. Penduduk miskin pada daerah pedesaan sebesar 2.874,97 ribu jiwa lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk perkotaan sebesar 1.457,61 ribu jiwa (Badan Pusat Statistika, 2018). Salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember masuk dalam sepuluh Kabupaten Kota dnegan jumlah penduduk miskin terbanyak se-jawa Timur. Kabupaten Jember menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Malang dengan rata-rata jumlah penduduk miskin selama 2012 sampai 2017 sebesar 208,77 ribu dari total penduduk di kabupaten Jember (Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur, 2018). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember sebenarnya sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimulai pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember sebanyak 280.000, tahun 2013 sebanyak 278.500, tahun 2014 sebanyak 270.000, tahun 2015 sebanyak 269.540, tahun 2016 sebanyak 265.100, tahun 2017 sebanyak 266,90 dan tahun 2018 sudah mengalami penurunan hingga 244.420 jiwa.



Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jember 2012-2018 (Sumber: Badan Pusat Statistika Tahun 2018, diolah)

Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menentukan perekonomian wilayah tersebut mau atau tidak. Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program, salah satunya adanya program otonomi desa merupakan kebijakan pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat (Adisasmita, 2006). Namun program tersebut belum membuahkan hasil maksimal sesuai dengan sebagaimana yang diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi dari masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di

pedesaan. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa “berbagi kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tidak melibatkan sepenuhnya aspirasi masyarakat, tentang apa yang diinginkan dan bisa dilakukan masyarakat itu sendiri (Sandiasa, 2017:64). Peran pemerintah memang perlu untuk pembangunan namun pemerintah harus membatasi perannya, agar masyarakat dapat berkreasi dan berinovasi untuk menjalankan mesin ekonomi di desa. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi tersebut sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat, kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menerapkan pendekatan perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa (Derwita dan Nyoman, 2018).

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadi usaha masyarakat pada produktif dan efektif. Ke depan BUMDes akan berfungsi menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Derwita dan Nyoman, 2018).

Desa di masa sekarang akan berhadapan dengan realita hadirnya persaingan pasar bebas, salah satu bentuknya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk menciptakan daya saing desa, maka perlu adanya

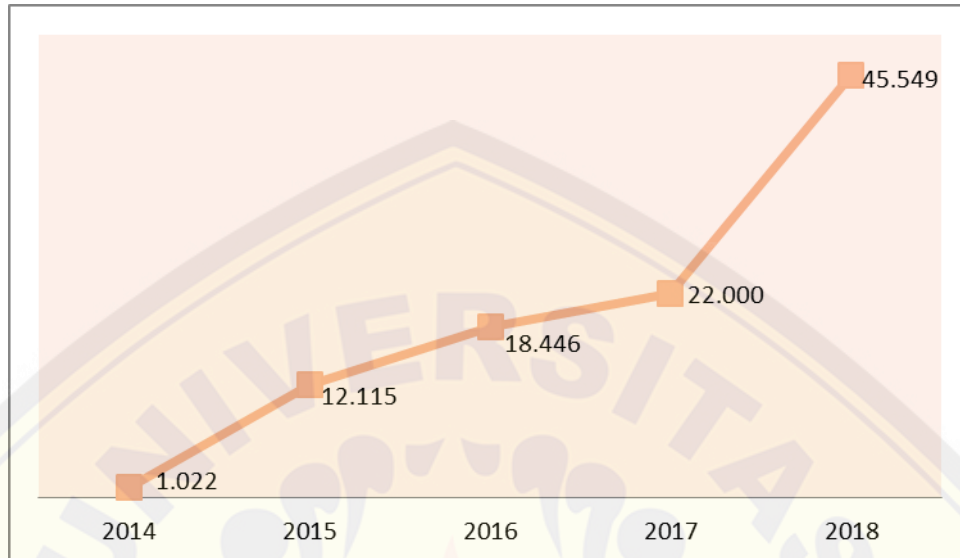
inventarisir potensi dari masing-masing desa untuk menjadikan produk unggulan lokal. Sehingga BUMDes menjadi penting kehadirannya untuk melahirkan usaha perekonomian masyarakat desa yang kompetitif.

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengolahannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.

Setelah digulirkannya secara nasional UU tentang Desa no. 6 tahun 2014 yang beberapa pasalnya mengatur tentang BUMDES, yaitu pasal 87, 88, 89 da 90. Dana besar dalam bentuk Alokasi Dana Desa akan mengguyur desa secara nasional. Tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki rencana untuk mengguyurkan dana besar langsung ke rekening Pemerintah Desa tanpa melalui Pemeritah Kabupaten yang dirasa selama ini telah menghambat penyaluran dana desa. Pengelolaan dana desa tersebut diprioritaskan untuk pembentukan BUMDES atau tambahan modal usaha untuk perbaikan ekonomi desa, terutama ditujukan untuk mengelola sumber daya potensial di desa (Widiyatmoko, 2016).

Pada tahun 2018 ini jumlah BUMDes di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tinggi, yang sebelumnya pada tahun 2014 berjumlah 1.022 dan sampai tahun 2018 ini jumlahnya mencapai 45.549 BUMDes. BUMDes ini tersebar diseluruh wilayah Indonesia salah satunya adalah Jawa Timur. Jawa Timur adalah provinsi nomor dua di Indonesia dengan jumlah BUMDes terbanyak yaitu, 5.865. Salah satu wilayah penyebaran BUMDes terbanyak di wilayah Jawa Timur adalah di kabupaten Jember dengan jumlah BUMDes 220 dari total seluruh desa 226 (Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Ditjen PPMD Kemendesa PD TT 2018). Kabupaten Jember mencoba untuk mengembangkan

desa-desa yang terdapat di Jember untuk menyongsong kebijakan baru pemerintah pusat ini (Widiyatmoko, 2016).



Gambar 1.4 Grafik Perkembangan Jumlah Badan Usaha Milik Desa di Indonesia Tahun 2014-2018 (Sumber: Direktorat PUED Kemendes PDTT, 2018 diolah)

Berdasarkan hasil rekapitulasi data BUMDes di Kabupaten Jember yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dihasilkan sepuluh BUMDes terbaik di Kabupaten . Kecamatan Panti selain sebagai salah satu kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi juga sebagai Kecamatan dengan BUMDes terbaik di Kabupaten Jember yang terletak di Desa Kemiri.

Tabel 1.2 Daftar 10 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terbaik di kabupaten Jember Tahun 2018

No.	Kecamatan	Desa	Nama Bumdes
1	Panti	Kemiri	KEMBANG
2	Puger	Grenden	GUNUNG MULIA
3	Mumbulsari	Mumbulsari	SETIA KAWAN
4	Wuluhan	Ampel	SRIKANDI AMPEL
5	Sumberjambe	Cumedak	CEMPEDAK
6	Balung	Balung Kulon	KARYA MANDIRI
7	Rambipuji	Rambipuji	MADANI
8	Tempurejo	Sidodadi	SIDO MAKMUR
9	Ambulu	Sabrang	MUGI MAKMUR
10	Ajung	Wirowongso	MERAH PUTIH

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keadaan pendapatan masyarakat desa sebelum dan sesudah adanya BUMDes di Kecamatan Panti ?
2. Bagaimana peran BUMDes dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Panti?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keadaan pendapatan masyarakat desa sebelum dan sesudah adanya BUMDes di Kecamatan Panti.
2. Untuk mengetahui peran BUMDes dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Panti.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat
Memberi wawasan kepada masyarakat akan pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka bagi mahasiswa Ilmu Ekonomi khususnya dan Universitas Jember pada umumnya.
3. Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan media belajar untuk memecahkan masalah secara ilmiah dan menambah pengetahuan tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengentaskan kemiskinan.
4. Bagi Pemerintah
Dapat dijadikan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah dalam masalah kemiskinan yang berkaitan dengan rendahnya pendapatan serta peran BUMDes dalam pengentasannya masalah kemiskinan.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

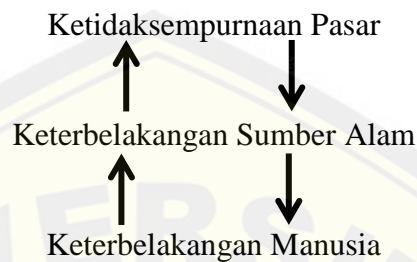
2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang dialami oleh banyak negara, bukan hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang namun juga negara yang ekonominya sudah mapan. Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relative baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Bantuan dari luar terkadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar (Kadji,2006). Supriatna (1997:90) Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan lingkaran ketidak berdayaan. Lingkaran ketidak berdayaan ini berpusat pada lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 1997) adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas.

Masalah produktivitas dalam lingkaran setan kemiskinan juga menyangkut tentang masalah keterbelakangan manusia dan sumber alam. Pengembangan sumber alam pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktif manusianya. Jika penduduknya terbelakang dan buta huruf, langka akan keterampilan, pengetahuan dan kewiraswastaan maka sumber-sumber alam akan tetap terbengkalai, kurang atau bahkan salah guna. Pada pihak lain, keterbelakangan sumber alam ini menyebabkan keterbelakangan manusia. Keterbelakangan sumber alam, karena itu merupakan sebab dan sekaligus akibat dari keterbelakangan manusia. “Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi dengan demikian merupakan dua istilah yang sinonim. Suatu negara dikatakan miskin karena ia terbelakang. Keterbelakangan yang terjadi karena

negara tersebut miskin dan tetap terbelakang yang tidak mempunyai sumber yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan (Meier dan Baldwin dalam Jhingan, 2010). Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.1 Hubungan Keterbelakangan Sumber Alam dan Keterbelakangan Manusia (Sumber: Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan M.L. Jhingan).

Teori Leibenstein tentang upah minimum kritis juga menjelaskan bahwa lingkaran setan kemiskinan membuat mereka yang berada disekitar tingkat keseimbangan memiliki tingkat pendapatan per kapita rendah. Hal ini dibuktikan melalui tesisnya dimana laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu fungsi dan laju pendapatan perkapita berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Masalah kemiskinan mendapat perhatian lebih dari gerakan global dimana hal tersebut tercermin melalui konferensi tingkat dunia yang berhasil menggelar Deklarasi dan Program Aksi Untuk pembangunan Sosial do Copenhagen pada tahun 1995, dimana dengan adanya hal tersebut membuat bangsa-bangsa di negara maju sadar bahwa “kemiskinan yang terjadi pada suatu tempat menimbulkan bahaya bagi kemakmuran” yang menunjuk pada rendahnya tingkat pendapatan serta kurangnya modal (Meier dan Baldwin, dalam Jhingan halaman 12).

Menurut Salim Emil (1986) masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan Indonesia adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang ditandai dengan pendapatan yang rendah dari sebagian besar penduduknya serta adanya kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Penduduk daerah pedesaan cenderung bekerja sebagai petani, dimana ketika pertanian dijadikan mata pencaharian utama kebanyakan bersifat tidak produktif, terutama karena penduduk desa melakukan aktifitas pertanian dengan cara kuno dan dengan

metode produksi yang usanga serta ketinggalan jaman (Jhingan, 2004). Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima, yang kemudian mengakibatkan rendahnya tabungan dan investasi, hal tersebut kan menimbulkan keterbelakangan dan begitu seterusnya. Penduduk daerah pedesaan cenderung bekerja sebagai petani, dimana ketika pertanian dijadikan mata pencaharian pokok kebanyakan bersifat tidak produktif, terutama karena penduduk desa melakukan aktifitas pertanian dengan cara kuno dan dengan metode produksi yang usang serta ketinggalan jaman (Jhingan, 2004).

Menurut Todaro (2000) kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: 1) kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. 2) Kemiskinan relative adalah kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relative erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Jember (2017), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini merupakan harga yang harus dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/bulan dengan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya. Garis kemiskinan pada tahun 2016 adalah Rp. 299.823 perkapita per bulan dan pada tahun 2017 menjadi Rp.310.650 perkapita per bulan data ini diperoleh berdasarkan survei susenas 2016 sampai 2017. Data ini diperoleh berdasarkan pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan menggunakan konsep tersebut kemiskinan dipandang

sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memnuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Menurut Sinungan (2005) produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara nilai yang dihasilkan suatu kegiatan produksi terhadap nilai semua masukan yang digunakan dalam melakukan kegiatan produksi. Rendahnya produktivitas menyebabkan pendapatan perkapita rendah. Menurut Untoro (2010: 13) pendapatan per kapita adalah rata-rata penduduk suatu negara. Pendapatan perkapita menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Pendapatan perkapita merupakan tolak ukur kemajuan dari suatu negara, apabila pendapatan perkapita suatu negara rendah dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat dinegara tersebut mengalami penurunan, dan begitu pula sebaliknya apabila pendapatan perkapita suatu negara tinggi maka dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat tersebut mengalami peningkatan (Rakiman, 2011: 80). Pendapatan yang tinggi akan meningkatkan minat masyarakat untuk menabung atau investasi.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Menurut Harrod-Domar pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi masyarakat rendah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah. Menurut Jhingan (1996) investasi atau pembentukan modal adalah jalan utama untuk keluar dari masalah negara terbelakang dan kunci utama menuju pembangunan ekonomi. Hal ini ditegaskan pula oleh Nurkse (1996) bahwa lingkaran setan kemiskinan dapat diputus melalui investasi atau pembentukan modal siklus ini dapat dilihat dalam gambar 1.1. Modal merupakan dan yang digunakan untuk biaya pengadaan aktiva serta dan untuk operasi perusahaan. Modal adalah hal penting dalam suatu kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Modal dapat berasal dari modal asing, modal sendiri maupun gabungan dari kedua modal tersebut (Atmaja, 2008). Dalam hal ini

penambahan modal dapat dibantu dengan peran pemerintah seperti teori yang dikemukakan oleh Keynes dan Leibenstein.

2.1.2 Badan Usaha Milik Desa

Pemerintah memiliki tujuan membangun daerah pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Beberapa program diluncurkan oleh pemerintah salah satunya tentang otonomi desa, dalam program otonomi desa pemerintah terlalu memberikan intervensi pada desa yang membuat desa tidak dapat berinovasi dan tidak maksimal dalam mengembangkan potensinya (Adisasmita, 2006).

Program Otonomi desa yang diluncurkan kurang berhasil sehingga pemerintah menerapkan pendekatan atau program baru yang diharapkan dapat menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Derwita dan Nyoman, 2018).

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengolahannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.

Setelah digulirkannya secara nasional UU tentang Desa no. 6 tahun 2014 yang beberapa pasalnya mengatur tentang BUMDES, yaitu pasal 87, 88, 89 da 90. Dana besar dalam bentuk Alokasi Dana Desa akan mengguyur desa

secara nasional. Tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki rencana untuk mengguyurkan dana besar langsung ke rekening Pemerintah Desa tanpa melalui Pemerintah Kabupaten yang dirasa selama ini telah menghambat penyaluran dana desa. Pengelolaan dana desa tersebut diprioritaskan untuk pembentukan BUMDES atau tambahan modal usaha untuk perbaikan ekonomi desa, terutama ditujukan untuk mengelola sumber daya potensial di desa (Widiyatmoko, 2016).

BUMDES memiliki ciri utama yang membedakan dengan badan usaha lain (Pusat kajian Dinamika Sistem pembangunan 2017) ciri utama yang membedakan adalah 1) badan usaha yang ada adalah milik desa dengan pengelolaan yang dilakukan secara bersama-sama; 2) modal usaha yang digunakan berasal dari dana desa dan masyarakat, dari dana desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49%; 3) informasi pasar serta potensi yang dimiliki oleh desa menjadi acuan untuk menjalankan usaha yang ada di dalam BUMDes; 4) laba yang didapatkan BUMDes digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat menurut peraturan yang ditetapkan; 5) BUMDes dalam pelaksanaannya difasilitasi atau ditunjang oleh pemerintah mulai dari pemerintah Provinsi, kabupaten maupun pemerintah Desa; 6) BUMDes juga diawasi oleh pemerintah desa maupun BPD dalam pelaksanaan operasionalnya.

Sebagai institusi baru dalam desa BUMDes memiliki tantangan serta peluang tersendiri, oleh karena itu perlu adanya tata kelola BUMDes agar mampu bersaing serta membantu masyarakat meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Prinsip dan aturan harus disusun guna untuk mendukung berjalannya organisasi

2.1.3 Peran Pemerintah

Pada dasarnya, pemikiran teori Keynes muncul sebagai reaksi kritis terhadap teori ekonomi yang dikeluarkan Adam Smith yang mengagungkan mekanisme pasar bebas. Keynes menyarankan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Sehingga pada batas tertentu

peran pemerintah juga diperlukan, misalnya jika terjadi pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek pada karya yang dengan demikian sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal, dengan kebijakan fiskal pemerintah pemerintah bisa memengaruhi jalannya perekonomian. Langkah tersebut dilakukan dengan menyuntikkan dana berupa proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja dan membantu meningkatkan perekonomian. Kebijakan mampu meningkatkan output dan mengurangi pengangguran terutama pada situasi saat sumber-sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh. Bagi Keynes peran pemerintah diperlukan pada saat perekonomian berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowering and sustainable* (Chambers, 1995). Konsep *empowering* dikembangkan secara luas sebagai alternatif konsep-konsep pembangunan yang telah ada. Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkat “*Zero-sum game dan trade off*” dengan titik tolak pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Hasil kajian berbagi proyek yang dilakukan *International Fund for Agriculture Development (IPAD)* menunjukkan bahwa dukungan dari produksi yang dihasilkan masyarakat lapisan bawah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan dihasilkan bukan hanya dengan biaya yang lebih kecil tetapi juga dengan devisa yang kecil (Brown, 1995), artinya sangat besar pengaruhnya bagi negara-negara berkembang yang mengalami kelangkaan devisa dan lemah dalam posisi neraca pembayaran.

Dalam kerangka ini upaya untuk pemberdayaan masyarakat dapat dibagi kedalam tiga aspek: *pertama, enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. *Kedua, empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. *Ketiga, protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan masyarakat keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi (Friedmann, 1994). Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial. Friedman, (1994) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas bidang ekonomi saja tetapi juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) baik secara nasional maupun internasional. Sebagai titik fokusnya adalah aspek lokalitas, karena *civil society* akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu local. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Dantika dan Yanuardi (2013), dalam penelitiannya yang berjudul Dampak BUMDes bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek

Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan di Desa Karangrejek, Wonosari Gunungkidul. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi dengan subjek penelitian yaitu Kepala Desa, pengelola BUMDes dan beberapa masyarakat Desa Karangrejek pengguna layanan BUMDes. Instrumen penelitian ini adalah diri peneliti sendiri. Guna menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yaitu analisis dengan menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Karangrejek telah berhasil memberi dampak positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDes belum berjalan secara keseluruhan. Dana yang dihasilkan dari BUMDes Karangrejek ini digunakan untuk pembangunan desa, selain memiliki dampak positif dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat keberadaan BUMDes ini juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. BUMDes Karangrejek semakin maju dengan adanya partisipasi masyarakat yang begitu tinggi karena dalam pengembangan BUMDes tidak lepas dari campur tangan masyarakat.

Dendhi Agung Nugroho (2015) dengan penelitiannya berjudul Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014 – April 2015) dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program BUMDes di desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung sudah cukup bagus terbukti dari hasil wawancara terhadap masyarakat desa terutama untuk kategori keluarga rumah tangga miski yang merasa cukup puas dengan adanya penerapan BUMDes selama satu tahun berjalan. Beberapa faktor yang memengaruhi kinerja BUMDes di desa Babadan seperti:

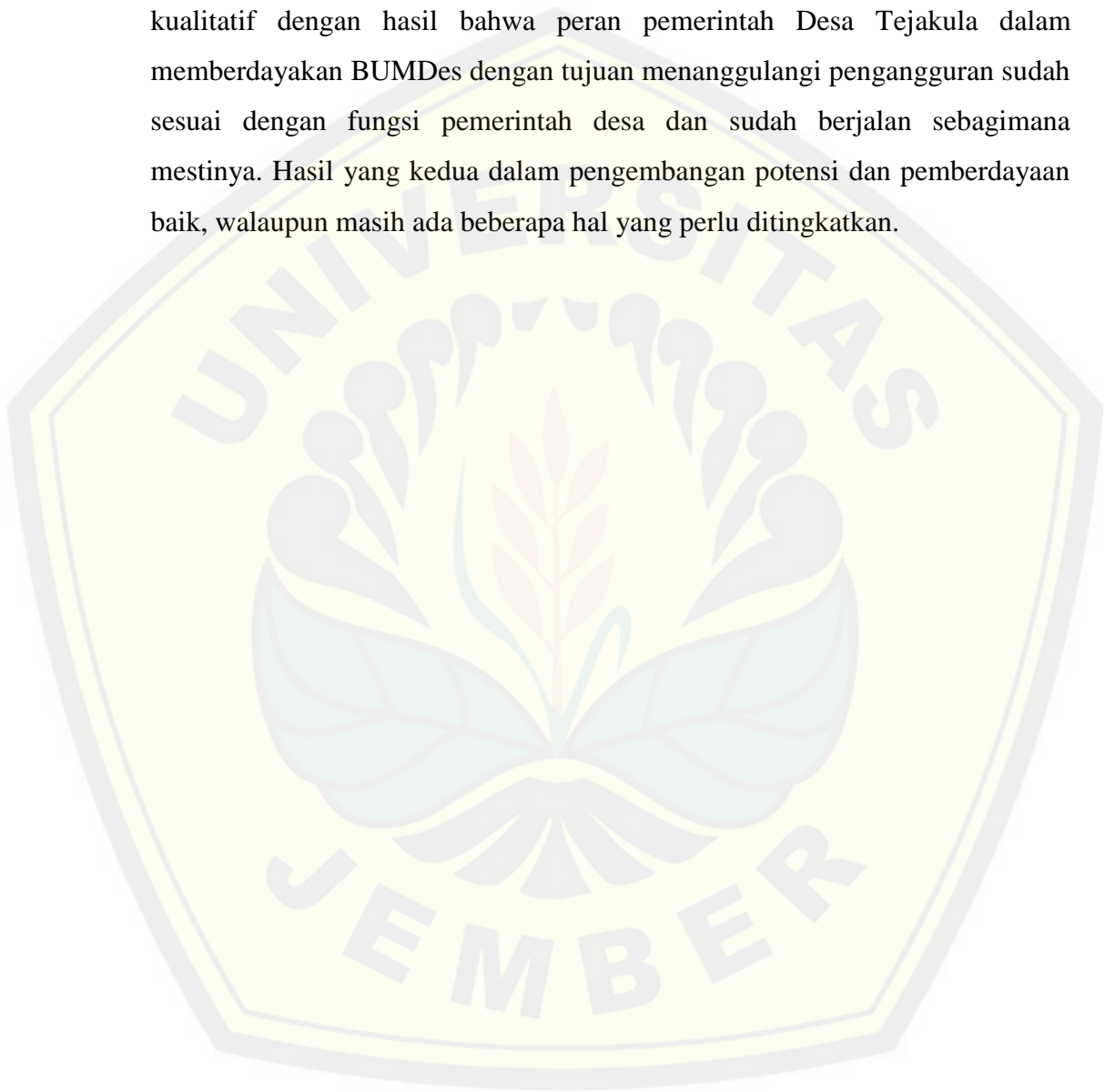
BUMDes memiliki susunan misi yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan membangun unit-unit usaha contohnya unit Simpan Pinjam, unit Kredit Sepeda Motor, unit sektor riil penyewaan lahan bengkok desa dan masih banyak lagi. Dengan adanya unit-unit usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan secara tidak langsung dapat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Andriani Sari (2017) dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbauangan Kabupaten Serdang Bedagai dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh BUMDes dalam pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbauangan yang dilihat dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes.

Yuni Syahara Rahma Dewi (2016) melakukan penelitian dengan judul Strategi Pembangunan Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP). Model penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan hasil yang menunjukkan PUAP dalam BUMDes dibutuhkan di Desa Sareng karena tingginya angka kemiskinan masyarakat yang diperoleh dari data monografi Desa Sareng berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraan dan mayoritas bermata pencaharian di sektor agraris. Pada tahun 2013 sistem PUAP belum optimal mengentaskan kemiskinan karena berbagai masalah terjadi dalam pengelolaan PUAP oleh karena itu diberikan pelatihan pengembangan ketrampilan agar penyelenggaraan PUAP yang lebih baik lagi.

Kadek dan Dewa (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pananggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Untuk variabel yang digunakan peran perencanaan pembangunan desa

terhadap pengelolaan BUMDes yang terdiri penyusunan perencanaan pembangunan desa, program kegiatan serta peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran yang dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan hasil bahwa peran pemerintah Desa Tejakula dalam memberdayakan BUMDes dengan tujuan menanggulangi pengangguran sudah sesuai dengan fungsi pemerintah desa dan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hasil yang kedua dalam pengembangan potensi dan pemberdayaan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.



Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Dengan Hasil Sebelumnya

Nama	Judul	Metode	Hasil
Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi M.Si (2013)	Dampak BUMDes bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Karangrejek telah berhasil memberi dampak positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDes belum berjalan secara keseluruhan.
Dendi Agung Nugroho (2015)	Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014 - April 2015)	Deskriptif kualitatif	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program BUMDes di desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung sudah cukup bagus terbukti dari hasil wawancara terhadap masyarakat desa terutama untuk kategori keluarga ramah tangga miski yang merasa cukup puas dengan adanya penerapan BUMDes selama satu tahun berjalan.
Andriani Sari (2017)	Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbauangan Kabupaten Serdang Bedagai	Deskriptif Kuantitatif	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh BUMDes dalam pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbauangan yang dilihat dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes.
Yuni Syahara Rahma Dewi (2016)	Strategi Pembangunan Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian	Deskriptif kualitatif	Hasil yang menunjukkan PUAP dalam BUMDes dibutuhkan di Desa Sareng karena tingginya angka kemiskinan masyarakat yang diperoleh dari data monografi Desa Sareng berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraan dan mayoritas bermata pencaharian di sektor agraris dan dengan adanya PUAP dapat

Nama	Judul	Metode	Hasil
	(PUAP)		mengurangi tingkat kemiskinan di desa Sareng
Kadek Derwita dan Dewa Nyoman (2018)	Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pananggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng	Deskriptif kualitatif	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan potensi dan pemberdayaan berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

2.3 Kerangka Konseptual

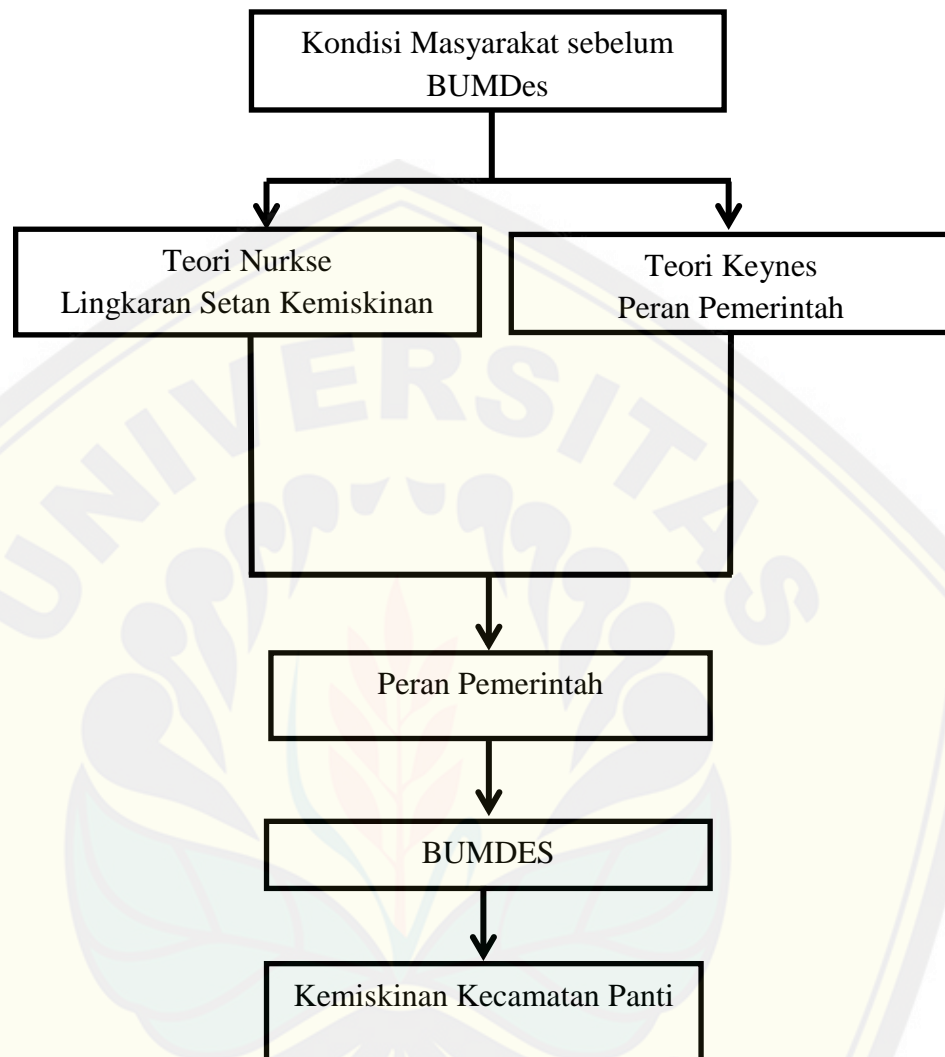
Menurut Hamdani dan Baharudin (2014:33) kerangka konseptual adalah uraian dari pemikiran yang dikemas secara ringkas agar lebih mudah dalam memahami makna dan tujuan dari penelitian yang diinginkan. Sehingga uraian atau paparan yang harus dilakukan dalam kerangka berfikir adalah pendapat antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi logika dalam menjelaskan dan memunculkan variabel –variabel tersebut, ketika dihadapkan dengan kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti.

Kemiskinan selalu dikaitkan dengan lingkaran setan kemiskinan seperti yang ditemukan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam Jhingan, dimana dikatakan bahwa “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu karena dia miskin). Miskinya suatu negara dapat disebabkan karena modal yang kurang kemudian berdampak pada produktivitas rendah, dengan produktifitas yang rendah akan berdampak pada pendapatan yang rendah, dengan pendapatan yang rendah akan berdampak pada tabungan dan investasi yang rendah dan dengan pendapatan dan investasi yang rendah akan mengakibatkan kurangnya modal untuk produksi. Siklus tersebut akan terus berlangsung seperti lingkaran yang tidak terputus atau biasa disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Rendahnya produktivitas disebabkan karena kebanyakan masyarakat buta huruf dan tidak terdidik, alat yang digunakan untuk produksi adalah alat yang usang dan sudah tertinggal, lapangan usaha hanya pada bidang pertanian pangan yang tidak banyak tersentuh sektor perekonomian pasar selain itu adalah kurangnya modal (M.L Jhingan).

Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk miskin di desa lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kota. Hal ini membuktikan bahwa daerah pedesaan di Jawa Timur rentan terhadap masalah kemiskinan. Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 pasal 19 Pengangguhan Kemiskinan, oleh karena itu perlu adanya pemotongan lingkaran setan kemiskinan untuk mengentaskan kemiskinan, salah satu caranya adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi desa dengan menciptakan program-program baru untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa. Hal

ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Midgley (1995:78-79) bahwa terdapat beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Proses dan intervensi mendapat sorotan karena terakait dengan konsep pemberdayaan, intervensi yang dimaksud disini adalah bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan adanya pemerataan kesejahteraan perlu adanya campur tangan pemerintah hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Keynes bahwa dalam menerobos hambatan perekonomian perlu adanya campur tangan pemerintah. Selain campur tangan pemerintah namun juga perlu adanya peran dari masyarakat itu sendiri.

Pemerintah menciptakan program pemberdayaan bagi masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan. Dengan berlandaskan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yang diatur dalam pasal 87, 88, 89, dan 90 yang mengatur tentang BUMDes. Dimana pemerintah juga mengguyurkan dana pada rekening Pemerintah Desa dengan tujuan untuk modal usaha dalam memperbaiki perekonomian di desa serta mengembangkan potensi yang ada didesa (Widyatmoko, 2016). Program pemerintah yang memfokuskan pada BUMDes ini diharapkan dapat mengembangkan ekonomi yang mampu merubah sumberdaya alam yang berguna dalam produksi serta pertumbuhan ekonomi yang terjadi semakin modern dan tingkat produksi barang yang dihasilkan semakin baik. Dengan adanya pembangunan desa melalui BUMDes ini selain untuk meningkatkan ekonomi desa juga untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan dalam sosial ekonomi masyarakat desa yang menyebabkan kemiskinan, hambatan tersebut meliputi pendapatan rendah serta mata pencaharian sebagai petani dengan produktivitas yang dihasilkan tidak maksimal (Jayadinata dan Pramandika, 2006:1).



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

(Sumber: Berbagai sumber, diolah)

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis ini dikatakan sebagai jawab sementara karena diberikan berdasarkan pada teori (Sugiyono, 2009). Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pendapatan masyarakat di Kecamatan Panti sebelum adanya BUMDes lebih rendah dan sesudah adanya BUMDes pendapatan masyarakat mengalami kenaikan dari sebelumnya.
2. Diduga terdapat peran BUMDes dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Panti yang dilihat dari adanya unit usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pengurus BUMDes.
3. Diduga terdapat perubahan jumlah masyarakat miskin sebelum dan sesudah adanya BUMDes di Kecamatan Panti.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu suatu penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya (Sukmadinata, 2006). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kondisi kemiskinan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya BUMDes di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua macam data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik benda maupun orang. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Data yang dikumpulkan diperoleh baik dari dokumen, instansi maupun sumber informasi lain.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai kondisi kemiskinan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya BUMDes di Kecamatan Panti Kabupaten Jember dilaksanakan di empat desa yang berada di Kecamatan Panti yaitu Desa Kemiri, Desa Suci, Desa Serut dan Desa Glagahwero. Dimana yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa yang menjadi anggota BUMDes dan dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Hal yang menyebabkan empat desa tersebut sebagai tempat penelitian adalah karena desa tersebut merupakan daerah yang tingkat kemiskinannya masih tergolong tinggi serta adanya BUMDes yang berkembang di desa tersebut. Penelitian ini dimulai bulan Juni 2019.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Ari Kunto (2010) bahwa populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang benda kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada subjek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh penduduk miskin desa dan desa yang memiliki BUMDes di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang menjadi objek penelitian. Menurut Sugiyono, sampel adalah sebagian dari populasi yang akan di selidiki atau dapat dikatakan bahwa sampel adalah populasi dalam bentuk mini (*miniature population*). Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* mengambil 4 desa dengan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Panti. *Desain purposive sampling* ini merupakan satu-satunya teknik sampling yang tepat dalam memperoleh informasi dari populasi yang sangat spesifik. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dan data

sekunder yang diperoleh dengan cara menyalin data yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini menggunakan kriteria inklusi artinya kriteria sampel yang ingin digunakan dalam penelitian berdasarkan tujuan penelitian.

Penelitian tentang Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Panti, maka kriteria inklusi yang dipakai antara lain:

- 1). Masyarakat desa yang matapencahariannya pada buruh dan pedagang dengan skala kecil.
- 2). Warga lokal, responden haruslah merupakan masyarakat asli Desa Kemiri, Desa Suci, Desa Serut dan Desa Galagahwero dengan tujuan agar kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat terlihat walaupun kecil.
- 3). Rentang Usia mulai dari 20 tahun, dengan rentang usia tersebut manusia masih memiliki produktivitas tenaga yang tinggi, sehingga masih giat mencari nafkah dan bekerja.
- 4). Warga lokal yang mengetahui ataupun berkecimpung dalam BUMDes.
- 5). Desa dengan Badan Usaha Milik Desa yang aktif serta memiliki unit usaha yang aktif pula.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan berbagai pertanyaan atau pernyataan tertulis yang nantinya akan dijawab oleh responden. Kuesioner ini disebarkan kepada responden penelitian, pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner akan dijawab dengan memilih jawaban yang sesuai dengan kondisi objektif sesuai keadaan responden penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kuesioner tertutup yang artinya sudah disediakan pilihan jawaban yang harus dipilih oleh responden penelitian.

2. Wawancara

Wawancara secara sistematis adalah wawancara dengan menggunakan daftar pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya (Basuki, 2006). Wawancara dilakukan menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan petunjuk umum atau panduan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pengurus BUMDes, pemilihan subjek wawancara ini dengan mempertimbangkan pengetahuan subjek tentang informasi yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Pada teknik ini peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari.

4. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sehingga peneliti mengadakan penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap segala-segala atau fenomena yang sedang diteliti. Observasi ini digunakan pada saat melakukan pengamatan pertama untuk mengetahui permasalahan yang dikaji dan juga sebagai pelengkap dalam penelitian setelah proses wawancara dilakukan. Tujuan dilakukan observasi sebagai bahan untuk membandingkan hasil proses wawancara dengan hasil observasi oleh peneliti di lapangan.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit. Setelah data yang akan diolah diperoleh langkah selanjutnya melakukan pengujian data dengan menggunakan *SPSS* versi 18. Sesuai dengan tujuan penelitian maka teknik analisis data yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu:

3.5.1 Uji Beda Dua Kelompok (*Paired Sample T-Test*)

Uji Beda Dua Kelompok (*Paired Sample T-Test*) digunakan untuk melihat perbedaan kondisi kemiskinan masyarakat yang ada di Kecamatan Panti. Perbedaan kondisi kemiskinan masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes di masing-masing desa dapat dilihat dengan melihat perubahan pendapatan masyarakat di Kecamatan Panti sebelum dan sesudah adanya BUMDes. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan masyarakat desa yang ikut serta dalam BUMDes. Menurut Santoso (2015) dasar pengambilan keputusan dari pengujian ini adalah:

- a. Jika nilai Sig. (2 tailed) $< 0,05$ maka H_0 diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil sebelum dan sesudah
- b. Jika nilai Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka H_0 ditolak, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil sebelum dan sesudah

3.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang tidak tepat dan meluasnya fokus permasalahan, maka perlu adanya pembatasan sebagai berikut :

1. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan

bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, berdasarkan hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) garis kemiskinan pada tahun 2018 sebesar Rp. 324.174,- per kapita per bulan.

2. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran BUMDes dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Panti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis Uji Beda Dua Kelompok (Paired Sample T-Test) menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat desa di Kecamatan Panti khususnya desa yang memiliki BUMDes mengalami peningkatan, selain perubahan pendapatan masyarakat desa juga mengalami perubahan pada mata pencaharian yang merupakan dampak dari adanya unit-unit usaha yang diterapkan oleh BUMDes. Masyarakat yang dulunya bekerja sebagai petani, buruh tani ataupun buruh bangunan sesudah adanya BUMDes beralih menjadi pedagang dengan adanya modal yang diberikan oleh BUMDes melalui Simpan Pinjam.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes dapat dilihat dari unit-unit usaha yang diterapkan oleh BUMDes, semakin banyak unit usaha yang diterapkan semakin banyak BUMDes tersebut memberikan dampak atau peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa khususnya. Namun tidak semua BUMDes yang ada di Kecamatan Panti memberikan peran dan dampak dalam perekonomian masyarakat, hal ini dikarenakan pendirian BUMDes yang masih baru serta pengelolaan BUMDes yang kurang maksimal.

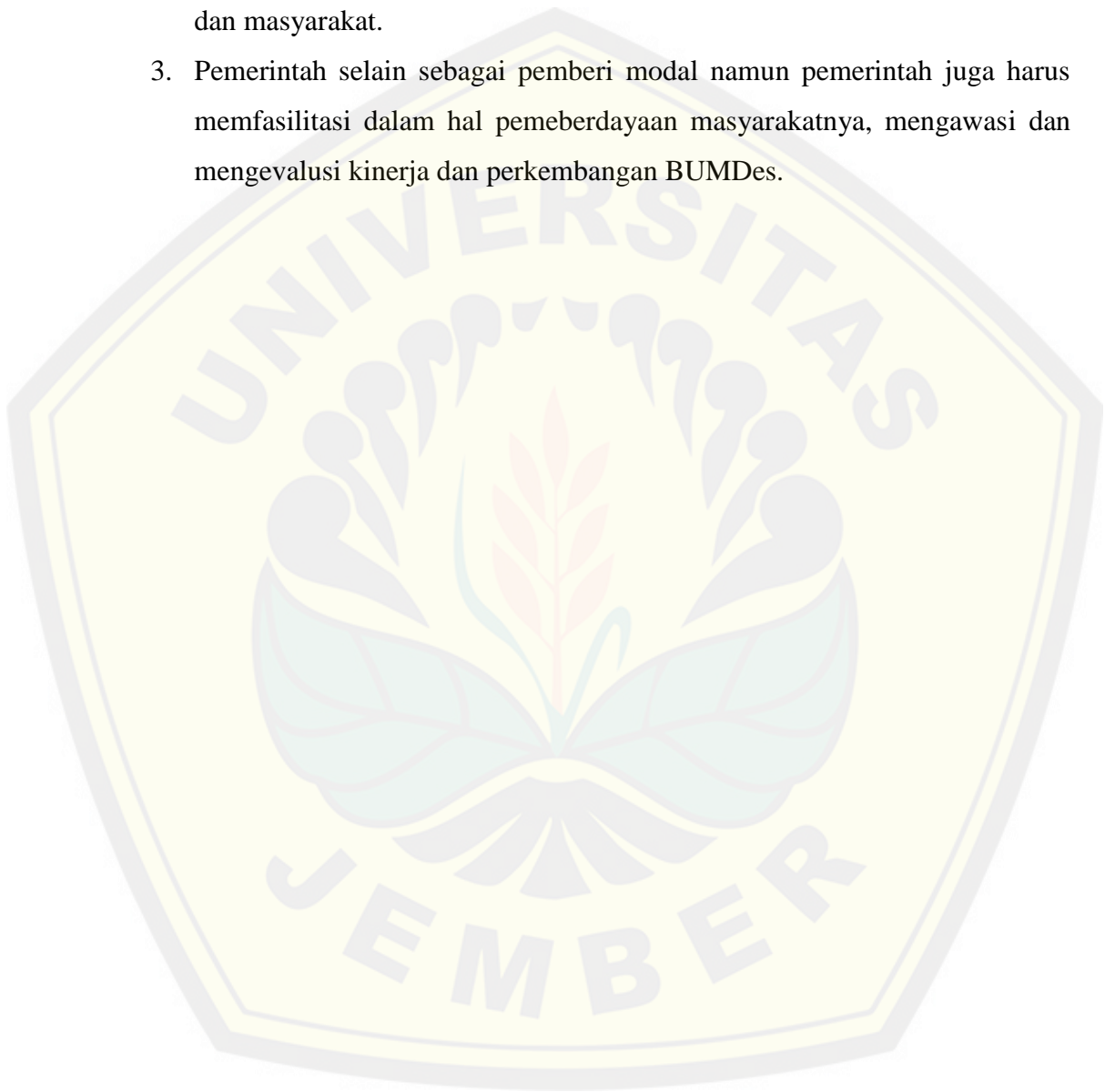
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan pada penelitian ini, maka adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUMDes perlu ditingkatkan baik dalam kemampuan managerial, pengambilan keputusan maupun peningkatan kemampuan atau skill. Pemerintah harus memperhatikan hal tersebut, jadi pemerintah tidak

hanya memberi modal saja tetapi juga memperhatikan kualitas sumber daya yang mengelola BUMDes.

2. Pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi dan penyuluhan dengan pendekatan yang lebih intens sehingga terbentuk relasi antara BUMDes dan masyarakat.
3. Pemerintah selain sebagai pemberi modal namun pemerintah juga harus memfasilitasi dalam hal pemberdayaan masyarakatnya, mengawasi dan mengevaluasi kinerja dan perkembangan BUMDes.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alkaff, Alwi. 2016. Revitalisasi BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Penganggulan Kerentanan Kemiskinan Masyarakat Desa Di Kabupaten Jember. Jember: *Paradigma Madani*, Vol. 3 No.2 November 2016
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pemberdayaan Masyarakat. 2018. *10 Daftar BUMDes Terbaik di Kabupaten Jember Tahun 2018*. Jember: Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- Badan Pusat Statistika. 2018. *Presentse Kemiskinan di Pulau Jawa 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- BPS Kabupaten Jember. 2018. *Kabupaten Jember Dalam Angka 2018*. Jember: BPS Kabupaten Jember.
- BPS Kabupaten Jember. 2018. *Kecamatan Panti Dalam Angka 2018*. Jember: BPS Kabupaten Jember.
- Bulog Divisi Regional XI Kabupaten Jember. 2018. *Banyaknya Desa dan Jatah Beras Pogram Raskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember 2017*. Jember: BPS Kabupaten Jember
- Darwita, Kadek dan Redana, Dewa Nyoman. 2018. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Bali: *Locus Majalah Ilmiah FISIP* Vol 9 No.1 – Pebruari 2018
- Dewi, Yuni Syahara Rahma. 2013. Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Mahasiswa UNESA* Vol. 1 No.3 2013.

- Direktorat PUED-Kemendesa PDTT. 2015. *Perkembangan Jumlah BUMDes Berdasarkan Provinsi Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat PUED-Kemendesa PDTT.
- Direktorat PUED-Kemendesa PDTT. 2018. *Perkembangan Jumlah BUMDes Berdasarkan Provinsi Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat PUED-Kemendesa PDTT.
- Eko, Dwi W. 2006. *Teori Ekonomi Makro, Edisi revisi*. Malang: UMM Press
- Gerald M. Meier dan Robert E. Baldwin 1972. Alih Bahasa oleh P. Sihotang. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Bhratara
- Harord Domar. 1957. *Model Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka
- Hikmat, Harry.2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*.Bandung: Humaniora Paratama Press
- Jayadinata, J.T. dan Pramandika, I.G.P. 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*.Bandung: ITB
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*.Jakarta: CV. Rajawali
- Jhingan, M.L, 1996. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Yogyakarta Rajawali press
- Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas*. Tulungagung: Cahaya Abadi
- Kuncoro Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Masalah Kebijakan*. Yogyakarta: YKPN
- Midgley, James. 1995. *Social Development: The Development Perspective In Social Welafre*. London, Thousand Oaks, CA and Delhi. London: Sage Publications, Vol. 21Issue 1
- Nurkse, Ragnar. Unpublished. (RNP, 1953), Letter to François Perroux, January 17, 1953, Ragnar Nurkse Papers, Box 11, Folder 6; Public Policy Papers, *Department of Rare Books and Special Collections*, Princeton University Library.

- Nursetyo. 2013. Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus 44 Kota di Indonesia Tahun 2007-2010), *Jurnal Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro* Tahun 2013
- Permendagri No. 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Sandiasa, Gede dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, 2017. “Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan”. *Dalam Locus Majalah Ilmiah Fisip* Vol 8 No. 1- Agustus 2017, P. 64-78
- Santoso, Kabul.1992. *Kemiskinan:Reorientasi Strategi dan Pengendaliannya*. Jember:[s.n.]
- Sinungan, Muchdarsyah. 2005 . *Produktivitas : Apa dan Bagaimana*. Edisi Kedua. Bumi aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Tama, Dantika Ovi Eka dan Yanuardi. 2013. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul*.
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar*. Jakarta: Erlangga.
- Widiyatmoko, Faris. 2016. *Revitalisasi Local Self Government Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Academi.edu
- Widiyatmoko, Faris. *Kinerja Badan usah Milik Desa (BUMDes) Desa Kemiri Kabupaten Jember Berdasarkan Pendekatan Balanced Scorecard*. Jember
- Untoro, Joko. 2010. *Ekonomi*. Jakarta: Kawahmedia
- UU No. 6 tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 19 Penganggulan Kemiskinan
- Yanuardi, 2004. *Dampak Badan Usaha Milik Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten*

Gunungkidul, Yogyakarta.





Lampiran A

Banyaknya Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember
Tahun 2017

No	Kecamatan	Rumah Tangga Miskin
1	Kencong	2963
2	Gumuk Mas	3489
3	Puger	4274
4	Wuluhan	4510
5	Ambulu	4566
6	Tempurejo	6748
7	Silo	9900
8	Mayang	5848
9	Mumbulsari	8492
10	Jenggawah	4697
11	Ajung	5770
12	Rambipuji	3704
13	Balung	3484
14	Umbulsari	3922
15	Semboro	2804
16	Jombang	2554
17	Sumberbaru	11136
18	Tanggul	5958
19	Bangsalsari	9551
20	Panti	5599
21	Sukorambi	3174
22	Arjasa	5083

23	Pakusari	5134
24	Kalisat	10820
25	Ledokombo	9679
26	Sumberjambe	9236
27	Sukowono	8276
28	Jelbuk	5200
29	Kaliwates	3096
30	Sumbersari	3693
31	Patrang	4990
	Tahun 2017	178346
	Tahun 2016	192951

Sumber : Bulog Divisi Regional XI Kabupaten Jember Tahun 2018, diolah

Lampiran B

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota di Jawa Timur

Tahun 2012-2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Malang	275,50	288,60	280,30	292,87	293,74	283,96	268,49
Kab. Jember	280,00	278,50	270,40	269,54	265,10	266,90	243,42
Kab. Probolinggo	248,50	238,70	231,90	236,96	240,47	236,72	217,06
Kab. Sampang	253,40	248,20	239,60	240,35	227,80	225,13	204,82
Kab. Sumenep	232,20	225,50	218,90	216,84	216,14	211,92	218,60
Kab. Bangkalan	229,80	218,30	212,20	216,23	205,71	206,53	191,33
Kab. Kediri	209,00	202,70	196,80	199,38	197,43	191,08	177,20
Kab. Tuban	202,70	196,90	191,10	196,59	198,35	196,10	178,64
Kab. Bojonegoro	203,90	196,80	190,90	193,99	180,99	178,25	163,94
Kab. Lamongan	197,90	192,00	186,10	182,64	176,92	171,38	164,00
Kab. Pasuruan	179,10	175,70	170,70	169,19	168,06	165,64	152,48
Kab. Gresik	174,40	171,60	166,90	170,76	167,12	164,08	154,02
Kota Surabaya	175,70	169,40	164,40	165,72	161,01	154,71	140,81
Kab. Pamekasan	160,80	153,70	148,80	146,92	142,32	137,77	125,76
Kab. Banyuwangi	157,20	152,20	147,70	146,00	140,45	138,54	125,50
Kab. Jombang	149,60	137,50	133,50	133,75	133,32	131,16	120,19
Kab. Sidoarjo	130,50	138,20	133,80	136,13	136,79	135,42	125,75
Kab. Nganjuk	136,10	140,80	136,50	132,04	127,90	125,52	127,28
Kab. Ngawi	131,70	127,50	123,20	129,32	126,65	123,76	123,09
Kab. Lumajang	126,40	124,40	120,70	118,51	115,91	112,65	103,69
Kab. Blitar	121,60	120,30	116,70	114,12	113,51	112,93	112,40
Kab. Bondowoso	118,50	115,30	111,90	113,72	114,63	111,66	110,98
Kab. Mojokerto	112,70	116,60	113,30	113,86	115,38	111,79	111,55
Kab. Ponorogo	101,40	103,00	99,90	103,22	102,06	99,03	90,22
Kab. Trenggalek	96,90	92,80	90,00	92,17	91,49	89,77	83,50
Kab. Situbondo	94,50	90,30	87,70	91,17	89,68	88,23	80,27
Kab. Pacitan	94,50	91,70	88,90	92,08	85,53	85,26	78,64

Kab. Tulungagung	94,60	91,70	89,00	87,37	84,35	82,80	75,23
Kab. Madiun	91,80	83,70	81,20	84,74	85,97	83,43	77,75
Kab. Magetan	71,80	76,30	74,00	71,16	69,24	65,87	64,86
Kota Malang	43,50	41,00	40,60	39,10	37,03	35,89	35,49
Kota Kediri	22,30	22,80	22,10	23,77	23,64	24,07	21,90
Kota Probolinggo	24,30	19,20	19,00	18,66	18,37	18,23	16,90
Kota Pasuruan	15,10	14,60	14,20	14,52	14,93	14,85	13,45
Kota Blitar	9,10	10,10	9,80	10,04	9,97	11,22	10,47
Kota Batu	8,70	9,40	9,10	9,43	9,05	8,77	7,98
Kota Madiun	9,30	8,70	8,50	8,55	9,05	8,70	7,92
Kota Mojokerto	8,00	8,30	8,00	7,72	7,24	7,28	7,04
JAWA TIMUR	4 992,70	4 893,00	4 748,40	4 789,12	4 703,30	4 617,01	4 332,59

Sumber : Badan Pusat Statistika (Susenas Maret) Tahun 2018

Lampiran C

Data Hasil Kuesioner Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah BUMDes

No.	Inisial Responden	Sebelum BUMDes	Sesudah BUMDes
1	MR	Rp. 450.000	Rp. 900.000
2	SR	Rp. 600.000	Rp. 850.000
3	VN	Rp. 500.000	Rp. 700.000
4	SA	Rp. 300.000	Rp. 600.000
5	PN	Rp. 450.000	Rp. 850.000
6	YO	Rp. 650.000	Rp. 900.000
7	RA	Rp. 300.000	Rp. 750.000
8	MA	Rp. 450.000	Rp. 700.000
9	AB	Rp. 350.000	Rp. 750.000
10	RF	Rp. 500.000	Rp. 650.000
11	KT	Rp. 450.000	Rp. 700.000
12	AT	Rp. 350.000	Rp. 650.000
13	SM	Rp. 400.000	Rp. 750.000
14	EN	Rp. 450.000	Rp. 800.000
15	KS	Rp. 350.000	Rp. 650.000
16	GT	Rp. 450.000	Rp. 450.000
17	ED	Rp. 350.000	Rp. 350.000
18	DN	Rp. 450.000	Rp. 450.000
19	MT	Rp. 550.000	Rp. 550.000
20	SK	Rp. 450.000	Rp. 450.000

Sumber: Kuesioner 2019

Lampiran D

Data Hasil Kuesioner Karakteristik Responden Berdasarkan Mata Pencaharian
Sebelum dan Sesudah BUMDes

No.	Inisial Responden	Sebelum BUMDes	Sesudah BUMDes
1	MR	Buruh Tani	Pedagang
2	SR	Buruh Tani	Pedagang
3	VN	Buruh Tani	Pedagang
4	SA	Petani	Pedagang
5	PN	Petani	Pedagang
6	YO	Buruh Tani	Pedagang
7	RA	Buruh Tani	Pedagang
8	MA	Petani	Pedagang
9	AB	Petani	Pedagang
10	RF	Buruh bangunan	Pedagang
11	KT	Buruh bangunan	Pedagang
12	AT	Buruh Tani	Pedagang
13	SM	Buruh Tani	Pedagang
14	EN	Buruh bangunan	Pedagang
15	KS	Buruh bangunan	Pedagang
16	GT	Buruh Tani	Buruh Tani
17	ED	Petani	Petani
18	DN	Buruh Tani	Buruh Tani
19	MT	Buruh bangunan	Buruh bangunan
20	SK	Petani	Petani

Sumber: Kuesioner 2019

Lampiran E

Hasil Uji Normalitas Saphiro Wilk Pendapatan Masyarakat

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Sebelum BUMDes	20	100.0%	0	.0%	20	100.0%
Sesudah BUMDes	20	100.0%	0	.0%	20	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Sebelum BUMDes	Mean	440.0000	20.71104	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	396.6513	
		Upper Bound	483.3487	
	5% Trimmed Mean	436.1111		
	Median	450.0000		
	Variance	8578.947		
	Std. Deviation	92.62261		
	Minimum	300.00		
	Maximum	650.00		
	Range	350.00		
	Interquartile Range	137.50		
	Skewness	.490	.512	
	Kurtosis	.196	.992	
Sesudah BUMDes	Mean	672.5000	35.44362	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	598.3157	
		Upper Bound	746.6843	
	5% Trimmed Mean	677.7778		
	Median	700.0000		
	Variance	25125.000		
	Std. Deviation	158.50867		
	Minimum	350.00		

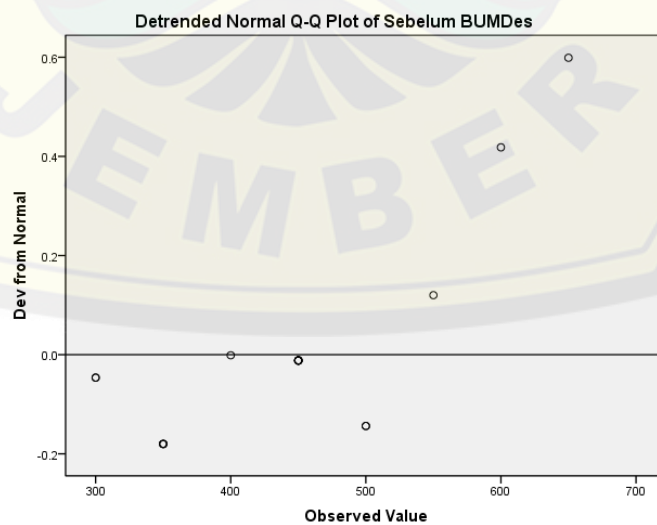
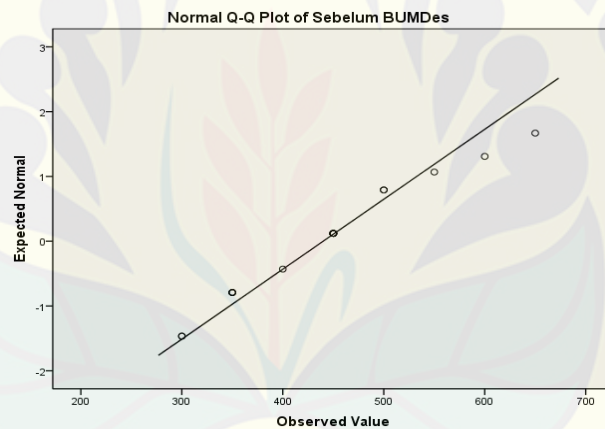
Maximum	900.00	
Range	550.00	
Interquartile Range	225.00	
Skewness	-.449	.512
Kurtosis	-.548	.992

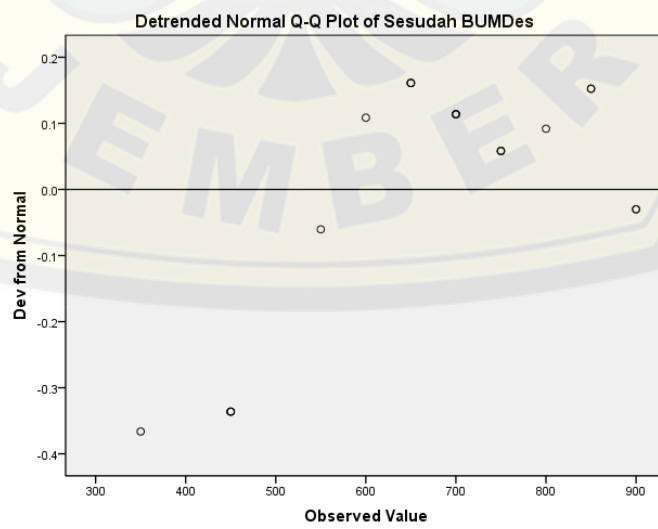
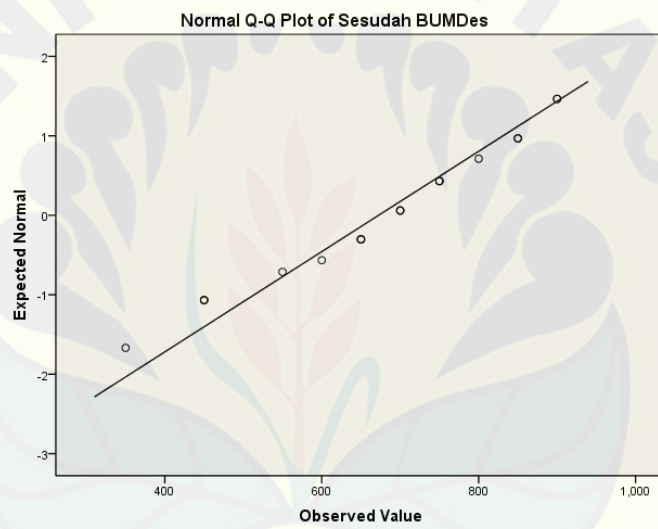
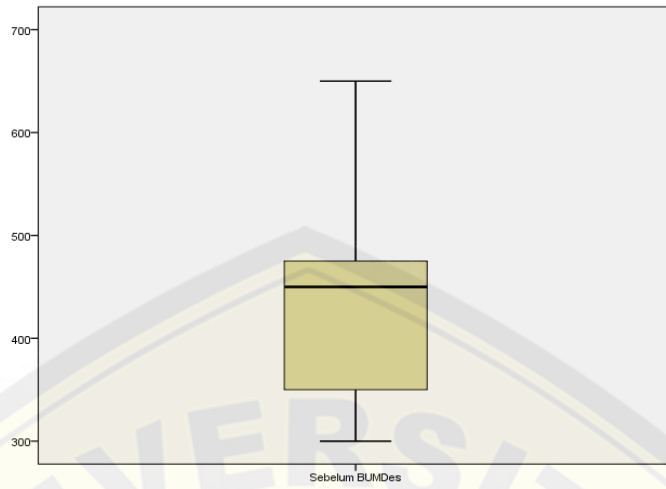
Tests of Normality

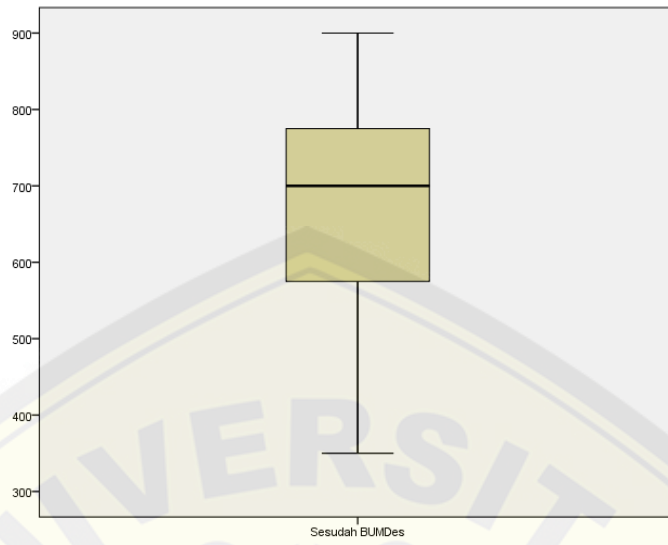
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum BUMDes	.207	20	.025	.925	20	.124
Sesudah BUMDes	.144	20	.200*	.947	20	.322

a. Lilliefors Significance Correction

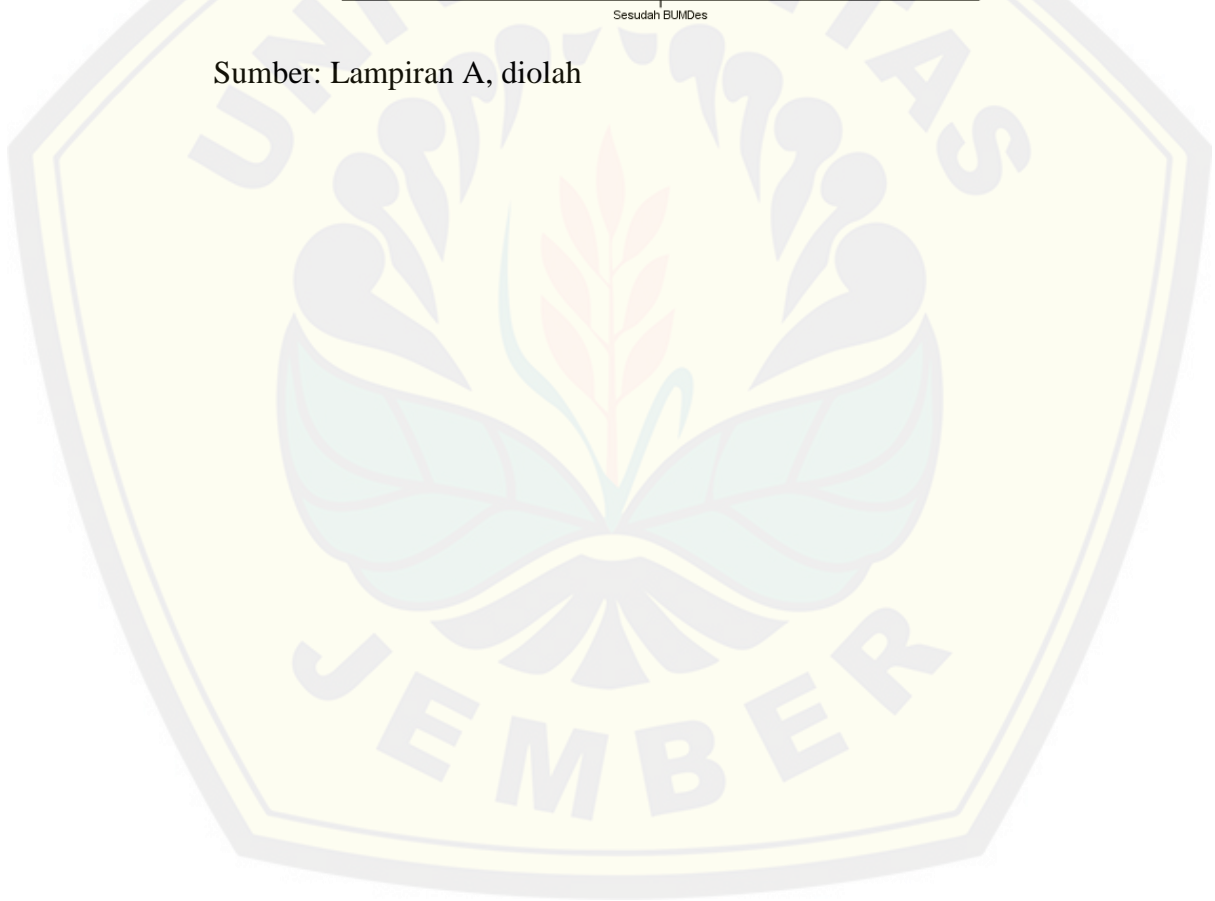
*. This is a lower bound of the true significance.







Sumber: Lampiran A, diolah



Lampiran F

Hasil Uji Paired Sample T-Test Pendapatan

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum BUMDes	440.0000	20	92.62261	20.71104
	Sesudah BUMDes	672.5000	20	158.50867	35.44362

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum BUMDes & Sesudah BUMDes	20	.303	.194

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum BUMDes - Sesudah BUMDes	-232.5000	157.50940	35.22017	-306.21667	158.78333	-6.601	19	.000

Sumber: Lampiran A, diolah

Lampiran G

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id
---	---

Nomer : 1703 /UN25.3.1/LT/2019 27 Mei 2019
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Jember
 Di
 Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember nomor 3407/UN25.1.4/LT/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Esi Intan Sari
 NIM : 150810101053
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
 Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
 Alamat : Jl. Jawa II No.5 Sumbersari-Jember
 Judul Penelitian : "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Panti Kabupaten Jember"
 Lokasi Penelitian : 1. Kecamatan Panti Kabupaten Jember
 2. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember
 Lama Penelitian : 3 Bulan (28 Mei-30 Agustus 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Ketua
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik II,

 Dr. Siswanto, M.Pd.
 NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth
 1. Camat Panti Kab. Jember;
 2. Kepala Dinsos Kab. Jember;
 3. Dekan FEB Universitas Jember;
 4. Mahasiswa ybs; ✓
 5. Arsip.

 
 CERTIFICATE NO. QMS/173

Lampiran H



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Sosial Kab. Jember
2. Camat Panti Kab. Jember
di -

J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1511/415/2019

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Ketua LP2M Universitas Jember tanggal 27 Mei 2019 Nomor : 1703/UN25.3.1/LT/2019 perihal Permohonan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Esi Intan Sari / 150810101053
Instansi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Alamat : Jl. Jawa II/5 Sumbersari, Jember
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul : "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Panti Kabupaten Jember"
Lokasi : ▪ Dinas Sosial Kabupaten Jember
▪ Kantor Kecamatan Panti Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : Juni s/d Agustus 2019

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 11-06-2019

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER
Sekretaris

Drs. HERTI WIDODO
 Pembina Tk. I
 NIP. 19611224198812 1001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Universitas Jember;
2. Yang Bersangkutan.